

Tanpa Payung Hukum, Subsidi SMA Bekasi Dihapus

PEMERINTAH Kota Bekasi menganggarkan sekitar Rp60 miliar untuk menyubsidi anggaran pendidikan siswa tingkat SMA dan SMK di wilayahnya. Namun, hingga kini anggaran itu belum bisa digunakan lantaran terkendala payung hukum.

"Kami sudah sediakan sekitar Rp60 miliar agar pendidikan untuk tingkat SMA/SMK di Kota Bekasi bisa gratis," ungkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, kemarin.

Menurut Rahmat, sejak pengurusan SMA dan SMK diambil alih Provinsi Jawa Barat, biaya pendidikan siswa tingkat itu semakin tinggi. Padahal, sebelumnya gratis.

"Nanti dari Jawa Barat berapa? Sekarang kan ada SMA reguler bayar Rp300 ribu, dari pusat sudah dapat subsidi Rp100 ribu, berarti sudah tinggal Rp200 ribu lagi. Nanti bisa saja Pak Gubernur Rp100 ribu dan Pemkot Bekasi Rp100 ribu sehingga pendidikan gratis," jelas Rahmat.

Meski sudah dianggarkan, hingga April 2019 dana tersebut belum bisa digunakan. Itu karena belum ada landasan hukum yang melindungi penggunaan dana tersebut. "Kita masih terus berkoordinasi dengan Pak Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil), semoga secepatnya," kata dia.

Sebelumnya diketahui, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, wewenang kepengurusan sekolah SMA dan SMK negeri di kabupaten/kota diserahkan kepada pemerintah provinsi. Namun, sejak dipegang Pemrov Jabar, beban pendidikan orangtua siswa semakin besar.

Awalnya, siswa yang duduk di jenjang SMA dan SMK negeri di Kota Bekasi tidak pernah dipungut biaya. Namun, sejak 2017 pihak sekolah melalui kesepakatan komite sekolah mulai memotong biaya sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP) mulai Rp150 ribu hingga Rp250 ribu.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, meminta agar orangtua murid SMA/SMK sederajat untuk bersabar. Pihaknya tak bisa berbuat banyak lantaran kewenangan tanggung jawab sekolah berada di bawah Provinsi Jawa Barat.

"Ya, saya berharap orangtua siswa bisa memahami kondisi yang ada sekarang. Semoga upaya pemkot membantu operasional sekolah tahun ini bisa berjalan," kata Inay.

Meski demikian, Inay mengatakan komunikasi antara Pemkot Bekasi dan Pemrov Jabar terus terjalin agar para siswa segera mendapatkan manfaat dari dana yang telah dianggarkan sejak jauh hari. "Semoga cepat ada solusi," tandas dia.

Saat ini bantuan yang sudah diterima manfaatnya oleh siswa ialah bus sekolah. Tahun ini, Pemkot Bekasi menambah enam unit bus transportasi pelajar di wilayahnya untuk menyasar sejumlah trayek menuju sekolah.

"Sejak peluncuran perdana bus sekolah pekan lalu, jumlahnya baru satu unit bantuan dari Kementerian Perhubungan. Ke depan akan kita tambah enam unit," kata Rahmat. (Gan/Ant/J-2)



TINJAU TITIK BANJIR: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) meninjau titik banjir yang bersebelahan dengan proyek konstruksi LRT di terowongan Cawang, Jakarta Timur, kemarin. Pemrov DKI akan memasang pompa permanen di sejumlah titik rawan banjir.

Pengendali Air akan Dibangun di Jatipadang

Jika sudah terbangun, sodetan dan tempat-tempat kontrol itu diharapkan dapat mengurangi aliran air ke Kali Pulo di Jatipadang.

PUTRI ANISA YULIANA
putrianisa@mediaindonesia.com

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengkaji pembuatan pengendalian air untuk menanggulangi banjir di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Banjir di wilayah itu diketahui sudah terjadi berulang kali akibat meluapnya saluran penghubung.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, luapan air terjadi karena volume air yang tidak mampu ditampung saluran penghubung tersebut. "Air berasal dari dua sungai, yakni sungai di aliran tengah dan aliran dari Situ Babakan. Di sungai aliran tengah akan dibangun sodetan dan tempat-tempat kontrol agar volume air yang mengalir ke Jakarta bisa lebih terkontrol," kata Anies, saat meninjau lokasi banjir di Jalan MT Haryono, Jakarta, kemarin.

Jika sudah terbangun, Anies mengatakan, sodetan dan tempat-tempat kontrol itu diharapkan dapat mengurangi aliran air ke Kali Pulo. Dengan demikian, saat terjadi hujan deras atau air kiriman dari Bogor, sodetan itu dapat meminimalkan banjir di kawasan Jatipadang.

Menurut Anies, banjir akan terus dialami Jatipadang bila Pemprov DKI tidak mengendalikan volume air yang masuk ke Jakarta melalui sodetan. "Karena air itu mengalir deras dari wilayah selatan Jakarta (Depok). Selama ini berjalan tanpa ada kendali. Karena itulah, selalu muncul masalah," lanjut Anies.

Menurut Anies, walau sungai dilebarkan, selama volume air yang datang dari Depok tidak dikendalikan dengan baik, masalah banjir tetap saja akan terjadi di kawasan Jatipadang.

"Masalahnya bukan semata-mata soal pelebaran sungai, me-

lainkan juga soal volume air yang tidak terkendali. Saat ini, di Situ Babakan sudah kita kendalikan. Kalau volume airnya besar, dapat dikendalikan. Tetapi yang di aliran tengah belum ada mekanisme pengendalian air. Jadi, kita akan bangun di ujung dekat perbatasan, tempat-tempat pengendalian air," ujar Anies.

Pasang pancang

Saat ini Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air Jakarta Selatan sudah memasang pancang dan kayu dolken di lokasi tanggul yang jebol di Jati Padang. Pancang dan kayu itu dipasang sementara untuk menahan air mengalir ke rumah warga. Sebanyak 15 personel dikerahkan membuat tanggul sementara ini.

Para petugas itu telah berkerja memasang tiang-tiang pancang kayu sejak pukul 08.00 WIB, kemarin pagi. Mereka fokus mengimpit tanggul dengan tiang pancang kayu dan dirapatkan dengan karung berisi tanah.

Setiap tanggul dipasang penahan dengan jarak berkisar antara 5 hingga 10 meter dengan 6 titik lokasi yang tersebar di RT 03 Jatipadang.

Pantauan *Media Indonesia*, kemarin, tanggul Kali Pulo hanya setinggi 1 meter mulai hilir Kali Pulo ke hulu yang melewati permukiman warga hingga ke RT 14 Jatipadang. Sementara itu, lebar kali bervariasi, dari 1,5 meter hingga 3 meter ke permukiman warga.

Selain itu, petugas menyiapkan sekitar 700 karung pasir untuk membendung air dari tanggul yang jebol agar tidak mengalir ke lokasi lain di sekitarnya.

Koordinator Lapangan Sudin SDA, Amus Setiawan, mengatakan, pihaknya menangani tanggul jebol untuk sementara waktu. Mereka memasang penahan tanggul dengan tiang pancang kayu dan karung tanah untuk menutupi lubang yang ada di dalam kali.

Amus mengatakan pemasangan penahan itu memang untuk sementara waktu. Karung-karung tanah itu ditanam dan dirapatkan dengan kayu tripleks dan tiang pancang di lokasi tanggul yang jebol.

"Ini untuk menjaga terjerangan air, tanah juga bisa meresap, sehingga mengurangi deras air yang ada," ujarnya. (Ssr/Fer/J-2)

EMERGENCY UI 2019

"THE UNTOLD STORY OF DISASTER"

ARIFIN PUTRA
CACTUS WORLD WIDE FUND FOR NATURE

I MADE OKA
KAPALA BESI OPERASI SIA

JERRY AURUM
PROFESOR, FAKULTAS TEKNIK

WINDA DWIASYUTI
KELOMPOK KEMAHIRAN

10:00 WIB
SENIN, 8 APRIL 2019

LINK PENDAFTARAN :
[HTTP://BIT.LY/EMERGENCYUI2019](http://bit.ly/emergencyui2019)
FREE E-SERTIFIKAT

AUDITORIUM VOKASI
UNIVERSITAS INDONESIA

@emergency.ui

PENGUMUMAN RENCANA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDO KORDSA Tbk

Dengan hormat, diberitahukan bahwa PT Indo Kordsa Tbk (Perseroan) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 di Mulia Hotel Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Peraturan OJK), maka panggilan untuk Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikinya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yang akan dilakukan Perseroan pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 di harian Media Indonesia.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sampai pukul 16:00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis tanggal 18 April 2019.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan dalam pasal 12 Peraturan OJK dan harap disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat dilakukan.

Citeureup - Bogor, 5 April 2019
Direksi Perseroan

Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)
PT. Bank Harda Internasional Tbk
Tanggal : 31 Maret 2019

(% per tahun)

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)	Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)				
	Berdasarkan Segmen Kredit				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi KPR	Kredit Konsumsi Non KPR
	12,90%	12,90%	12,90%	12,90%	12,90%

Keterangan:

- Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
- Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA).
- Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website Bank.

PENGUMUMAN

Direksi PT. PELITA BIRU dengan ini mengumumkan kepada seluruh kreditor perseroan bahwa berdasarkan RUPS yang telah diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019, para pemegang saham telah memberi persetujuan atas penurunan modal dasar dan modal disetor perseroan dari semula Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) diturunkan menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 UU Nomor 40 tahun 2007.

Jakarta, 05 April 2019
PT. PELITA BIRU
TTD
Direksi

BANK SHINHAN INDONESIA

Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate)
PT BANK SHINHAN INDONESIA
per 31 Maret 2019

(efektif % per tahun)

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate)				
	Berdasarkan Segmen Kredit				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi KPR	Kredit Konsumsi Non KPR
	8,93%	8,93%	9,98%	8,93%	9,00%

Keterangan:

- Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
- Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA).
- Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website Bank.

MEDIA PARTNERS BY
MEDIA INDONESIA
MEDIAINONESIA.COM